

**DAMPAK PENGHINDARAN PAJAK, KEPEMILIKAN BLOCKHOLDER,
KOMISARIS INDEPENDEN DAN KOMITE AUDIT TERHADAP NILAI
PERUSAHAAN**
***THE EFFECTS OF TAX AVOIDANCE, BLOCKHOLDER OWNERSHIP,
INDEPENDENT COMMISSIONER AND AUDIT COMMITTEE ON FIRM
VALUE***

Meco Sitardja

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

Email : msitardja@yahoo.com

ABSTRACT

The objective (s) of this research was analyzing whether tax avoidance, blockholder ownership, independent commissioner, and audit committee have any influence to firm value. This research uses secondary data and purposive sampling consisting of 72 listed companies in the manufacturing sector in Indonesia. The data was analysed in SPSS using multiple regression. The result shows that tax avoidance, institutional ownership, and independent commissioner don't influence significantly on firm value. Then, audit committee has positive impact on firm value. Simultaneously, tax avoidance, blockholder ownership, independent commissioner, and audit committee have significant impact on firm value.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan *blockholder*, komisaris independen, dan komite audit terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan *purposive sampling* yang terdiri dari 72 emiten perusahaan di sektor manufaktur di Indonesia. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penghindaran pajak, kepemilikan institusional, dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, komite audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian, ukuran perusahaan terbukti sebagai variabel pengendali yang baik terhadap nilai perusahaan. Secara simultan, penghindaran pajak, kepemilikan *blockholder*, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci: *Corporate Governance, Penghindaran Pajak, Blockholder*

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa “Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah”. Pajak terbukti memiliki pengaruh dalam penerimaan negara, karena pemerintah Indonesia selalu menaikkan target penerimaan dari sektor perpajakan dari tahun ke

tahun yang memiliki tujuan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan di dalam negeri.

Namun, di dalam kenyataannya adalah realisasi penerimaan pajak dalam 5 tahun ini tidak memenuhi target APBN (lihat table 1). Dalam tahun 2010 – 2014, ratio realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan dari target penerimaan pajak.

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2010 – 2014

| Tahun | Target Penerimaan Pajak | Realisasi Penerimaan Pajak | Persentase |
|-------|----------------------------|----------------------------|------------|
| 2010 | Rp 650.000.000.000.000,- | Rp 661.000.000.000.000,- | 98,3% |
| 2011 | Rp 872.000.000.000.000,- | Rp 878.000.000.000.000,- | 99,3% |
| 2012 | Rp 835.000.000.000.000,- | Rp 900.000.000.000.000,- | 92,7% |
| 2013 | Rp 1.072.100.000.000.000,- | Rp 1.148.400.000.000.000,- | 93,3% |
| 2014 | Rp 1.143.000.000.000.000,- | Rp 1.246.000.000.000.000,- | 91,7% |

Sumber : www.ekon.go.id

Tidak tercapainya penerimaan pajak karena adanya tindakan penghindaran dari perusahaan dengan memanfaatkan celah regulasi yang tidak jelas untuk memperoleh *outcome* pajak yang menguntungkannya (Dyrenge *et al*, 2008). Ini karena bagi

perusahaan, pajak akan mengurangi jumlah laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan, sehingga memungkinkan perusahaan berusaha untuk membayarnya seminimal mungkin.

Menurut Dyrenge *et. al* (2008), *tax avoidance* merupakan segala

bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktek *tax avoidance* biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Selain memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan, penghindaran pajak juga dapat memberikan efek negatif bagi perusahaan. Hal ini disebabkan, karena *tax avoidance* dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan tindakan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor. Dengan demikian para investor dapat memberikan penilaian yang rendah bagi perusahaan. Berdasarkan penelitian terdahulu (Wahyudi dan Pawestri, 2006; Chen *et al*, 2013), terbukti bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Selain itu, tindakan penghindaran pajak akan menimbulkan terjadinya *agency problem* yaitu konflik

kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Masing-masing pihak hanya mementingkan pribadinya saja. Oleh sebab itu *good corporate governance* jugaperlu diterapkan di perusahaan sebagai *check and balances* sehingga mengurangi adanya *agency problem* yang berdampak pada nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu (Siallagan dan Machfoedz, 2006; Pohan, 2009; Rupilu, 2011; dan Siagian *et al*, 2013), terbukti bahwa mekanisme *corporate governance* seperti kepemilikan *blockholder*, komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Dalam lima tahun terakhir ini, dari tahun 2010-2014, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yaitu tahun 2010 sebesar 6,22%, tahun 2011 sebesar 6,49 %, tahun 2012 sebesar 6,26 %, tahun 2013 sebesar 5,78 %, tahun 2014 sebesar 5,02% dan tahun 2015 sebesar 4,79%. Namun justru kebalikannya, *tax ratio* Indonesia itu stagnan dan mengalami sedikit kenaikan yaitu\

tahun 2010 sebesar 11,4%, tahun 2011 sebesar 11,8%, tahun 2012 sebesar 11,9 %, tahun 2013 sebesar 12,2% dan tahun 2014 sebesar 12,4% (BPS, 2015). Kondisi seharusnya adalah *tax ratio* Indonesia mengalami peningkatan, karena makin baiknya pertumbuhan ekonomi. Ini sesuai dengan definisi *tax ratio* (OECD) yang menyatakan bahwa perbandingan penerimaan pajak dengan PDB seharusnya berbanding lurus. Dengan kata lain, *tax ratio* seharusnya sesuai dengan pertumbuhan ekonomi. Fakta ini menunjukkan adanya *research gap* yaitu pertumbuhan ekonomi yang baik tidak seiring dengan *tax ratio*. Fenomena ini menunjukkan tingkat penghindaran pajak di Indonesia yang tinggi walaupun sudah diterapkan *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia. Diharapkan dalam penelitian ini, ditemukan *critical factor* internal perusahaan yang paling mempengaruhi khususnya peningkatan nilai perusahaan. Oleh karena itulah, penelitian mengenai pengaruh

penghindaran pajak, kepemilikan *blockholder*, komisaris independen dan komite audit terhadap nilai perusahaan. Kebaruan dalam penelitian ini adalah model penelitian ini menggabungkan predictor negatif yaitu penghindaran pajak dan faktor positif yaitu *corporate governance*. Model ini akan menggambarkan dampak yang paling dominan dari kedua prediktor terhadap nilai perusahaan sehingga hasil penelitian ini menjadi pertimbangan bagi para investor dalam mengukur kinerja perusahaan secara akurat.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory and Corporate Governance

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Pemisahan kepemilikan dan pengontrolan dalam suatu korporasi modern telah menimbulkan *agency*

problems (Jensen and Meckling, 1976). *Agency problems* inilah yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan nilai perusahaan.

Corporate Governance yaitu konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan menggunakan kerangka peraturan. Bahkan dalam penelitian Chendan Kao (2005) ditemukan bahwa mekanisme *corporate governance* seperti kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial akan mengurangi *agency cost*, sehingga berdampak kepada peningkatan nilai perusahaan.

Penelitian Sebelumnya

Firm value (nilai perusahaan) merupakan konsep penting bagi investor, karena merupakan indikator bagi pasar menilai perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, ada beberapa indikator yang dapat memperkuat atau memperlemah nilai

perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Black *et al* (2006) dan Siagian *et al* (2013) ditemukan bahwa *corporate governance* mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Ini sejalan dengan elemen – elemen *corporate governance* seperti kepemilikan *blockholder*, komisaris independen dan komite audit. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Sujono (2010) ditemukan bahwa kepemilikan *blockholder* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, di dalam penelitian Sari dan Ardiana (2014) juga ditemukan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Bahkan, temuan yang didapatkan di dalam penelitian Rupilu (2011) adalah adanya pengaruh positif antara komite audit dan nilai perusahaan. Ada indikator lain yang juga memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan yaitu penghindaran pajak. Indikator ini termasuk baru untuk diteliti. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Harlon and Slemrod

(2009), ditemukan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap harga saham. Harga saham dapat mencerminkan nilai suatu perusahaan (Fama, 1978 dalam Wahyudi dan Pawestri, 2006). Hal ini diperkuat lagi oleh penelitian oleh Chen *et al.* (2013) yang menyimpulkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan.

Pengembangan Hipotesa

Tax Avoidance and Firm Value

Secara tradisional, penghindaran pajak perusahaan menunjukkan *wealth transfer* dari pemerintah ke perusahaan dan seharusnya meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, di dalam literatur keagenan, *tax avoidance* dapat memfasilitasi kesempatan manajerial untuk melakukan manipulasi laba atau penempatan sumber daya yang tidak sesuai. Hanlon and Heitzman (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan pajak secara eksplisit. *Tax avoidance* menggambarkan sebuah

kelanjutan dari strategi perencanaan perpajakan perusahaan. Aktivitas *tax avoidance* memunculkan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan aktivitas yang didesain untuk menutupi berita buruk atau menyetatkan investor (Desai and Dharmapala, 2006). Manajer dapat membenarkan transaksi atas *tax avoidance* dengan mengklaim, bahwa kompleksitas dan ketidaktahuan menjadi hal yang penting dalam meminimalkan terdeteksinya aktivitas *tax avoidance* oleh pemeriksa pajak. Kesimpulannya adalah penghindaran pajak yang agresif dapat menyebabkan transaksi bisnis menjadi kurang transparan dan berdampak pada penurunan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Chen *et al* (2013) menemukan, bahwa perilaku penghindaran pajak meningkatkan biaya agensi dan mengurangi nilai perusahaan.

H1 : Terdapat pengaruh negatif Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan.

Blockholder Ownership dan Firm Value

Proporsi kepemilikan saham yang tinggi mempunyai peran yang lebih besar dalam mendorong manajemen untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976; Zeckhouser dan Pound, 1990) dalam Yuliani dan Muizuddin (2014). Hal ini terjadi jika *blockholder* tidak aktif menjalankan fungsinya. Jika *blockholder* mampu menjalankan fungsinya, kepemilikan *blockholder* yang semakin tinggi akan meningkatkan nilai perusahaan. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Thomsen *et al* (2006) dan Sujono (2010) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara kepemilikan *blockholder* terhadap nilai perusahaan. Selain itu, ada hasil penemuan yang berbeda yang ditemukan oleh Yuliani (2012) yaitu dalam pengujian secara tidak langsung, kepemilikan *blockholder* tidak meningkatkan nilai perusahaan dan dalam pengujian secara tidak langsung,

kepemilikan *blockholder* justru meningkatkan nilai perusahaan.

H2 : Terdapat pengaruh positif Kepemilikan *Blockholder* terhadap Nilai Perusahaan

Independent Commissionerdan Firm Value

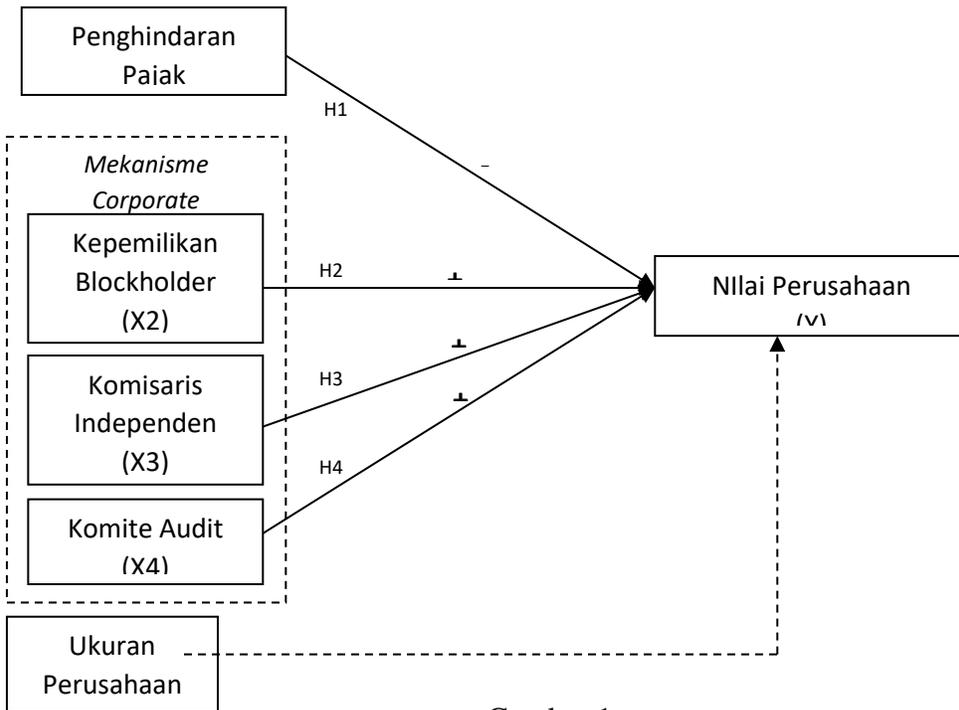
Dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas (Boediono, 2005). Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi pemantauan untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan membuat laporan keuangan menjadi lebih objektif (Kurniasih dan Sari, 2013). Apabila komisaris independen berfungsi secara efektif, maka akan menjaga perusahaan berjalan sesuai kepentingan pemegang saham. Keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan kinerja manajemen sehingga akan berdampak pada nilai perusahaan yang meningkat. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosenstein and Wyatt

(1990) dalam Choi *et al* (2012). yang menyimpulkan, bahwa direktur luar sebagai pengawas independen manajemen memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu juga mendukung hasil penelitian ini (Beasley, 1996; Brickley *et al*, 1997) dalam Choi *et al* (2012). Namun, penelitian yang

dilakukan oleh Herawaty (2008) dan Animah (2009) dalam Debby *et al* (2013) menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dijabarkan adalah:

H3 : Terdapat pengaruh positif Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan.



Gambar 1
Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan (kecuali perusahaan non keuangan) yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah organisasi, yaitu emiten perusahaan. Pengambilan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang menggunakan laporan keuangan disajikan dalam Rupiah.
2. Perusahaan manufaktur yang tercatat pada periode 2012-2013.
3. Perusahaan yang tidak pernah dikeluarkan (*delisting*) dari

Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2013.

Penentuan kriteria-kriteria dalam metode *purposive sampling* dikarenakan perusahaan-perusahaan manufaktur memiliki proses tahapan aktivitas perusahaan yang lengkap, sehingga pengujian penghindaran pajak lebih komprehensif dan detail.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau tidak langsung dari sumber utama (perusahaan), berupa laporan keuangan dan data lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda dengan menggunakan SPSS 22.

Tabel 2
Variabel Operasional dan Skalanya

| Variabel | Skala | Pengukuran | Referensi |
|-------------------------|-------|--|---|
| Variabel Dependen | | | |
| Nilai Perusahaan | Rasio | Tobin's Q () | Herawaty (2008) |
| Variabel Independen | | | |
| Penghindaran Pajak | Rasio | Cash Effective Tax Rate (ETR) | Hanlod and Semrod (2009) |
| Kepemilikan Blockholder | Rasio | Persentase saham perusahaan dengan minimal kepemilikan sebesar 5% terhadap total saham | Thomsen <i>et al</i> , (2006); Yuliani & Muizuddin (2014) |
| Komisaris Independen | Rasio | Persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah komisaris | Rupilu (2011) |
| Komite Audit | Rasio | Jumlah anggota Komite Audit | Nasution dan Setiawan (2007) |
| Variabel Kontrol | | | |
| Ukuran Perusahaan | Rasio | Logaritma natural dari Total Aset | Sujoko dan Subiantoro (2007) |

Sumber : Jurnal Penelitian

Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model persamaan sebagai berikut, yaitu:

$$FV = \beta_0 + \beta_1 \text{TAX} + \beta_2 \text{BLK} + \beta_3 \text{IND} + \beta_4 \text{AUD} + \beta_5 \text{SIZE} + \varepsilon$$

Keterangan:

FV = Nilai Perusahaan

TAX = Penghindaran Pajak

BLK = Kepemilikan *Blockholder*

- IND = Komisaris Independen
AUD = Komite Audit
SIZE = Variabel control ukuran perusahaan
 ε = *Error term* atau derajat kesalahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data/Obyek Penelitian

Sampel penelitian ditentukan secara *purposive sampling* terbagi dalam subkategori yaitu sektor semen (1 perusahaan); sektor keramik, porselen & kaca (5 perusahaan); sektor logam & sejenisnya (9 perusahaan); sektor kimia (6 perusahaan); sektor plastic & kemasan (6 perusahaan); sektor pakan ternak (2 perusahaan); sektor kayu & pengolahannya (2 perusahaan); sektor pulp & kertas (4 perusahaan); sektor otomotif &

komponen (7 perusahaan); sektor tekstil & garment (7 perusahaan); sektor alas kaki (2 perusahaan); sektor kabel (5 perusahaan); sektor makanan & minuman (7 perusahaan); sektor rokok (2 perusahaan); sektor farmasi (3 perusahaan); sektor kosmetik & barang keperluan rumah tangga (3 perusahaan) dan sektor peralatan rumah tangga (3 perusahaan). Total sampel penelitian sebanyak 72 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian selama 2 tahun. Penentuan sampel dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel 3
Pengambilan Sampel Penelitian

| Kriteria pengambilan sampel | Jumlah |
|--|--------|
| Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2013 | 137 |
| Perusahaan yang laporan keuangannya disajikan dalam Dollar | 27 |
| Perusahaan yang IPO sejak tahun 2013 | 5 |
| Perusahaan yang delisting | 1 |
| Perusahaan yang menjadi dihilangkan karena outlier | 32 |
| Jumlah Perusahaan yang menjadi Sampel | 72 |
| Jumlah Pengamatan (72 x 2 tahun) | 104 |

Sumber : Pengolahan Data BEI

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Tabel 4
Deskriptif Statistik

| <i>Variable</i> | N | Minimum | Maksimum | <i>Mean</i> | <i>Std. Deviation</i> |
|-------------------------|-----|---------|----------|-------------|-----------------------|
| Nilai Perusahaan | 144 | 0.436 | 2.302 | 1.115 | 0.408 |
| Penghindaran Pajak | 144 | -4.012 | 12.320 | 0.529 | 1.630 |
| Kepemilikan Blockholder | 144 | 22.480 | 98.960 | 71.218 | 17.730 |
| Komisaris Independen | 144 | 0.000 | 66.667 | 37.651 | 10.076 |
| Komite Audit | 144 | 2.000 | 4.000 | 3.076 | 0.356 |
| Ukuran Perusahaan | 144 | 11.461 | 19.181 | 14.016 | 1.391 |

Sumber : Pengolahan Data BEI dengan SPSS 22

Berdasarkan tabel 4, disimpulkan bahwa sebagian besar sampel perusahaan dimiliki oleh *blockholder* dengan rata-rata sebesar 71,22%. Minimal kepemilikan sebesar 22,5% dan maksimal kepemilikan sebesar 71,22%. Hal ini juga diikuti oleh keberadaan komisaris independen di dalam struktur dewan komisaris sebesar 37,65% secara rata-rata. Namun ada perusahaan yang tidak memiliki komisaris independen dan ada perusahaan yang memiliki 66% komisaris independen dari struktur dewan komisaris. Selanjutnya, secara umum sampel perusahaan memiliki asset yang cukup tinggi sebesar 14,02 dan cukup merata di antara sampel perusahaan. Dan tingkat penghindaran pajak perusahaan cukup rendah, karena rata-ratanya sebesar 0,5. Hal ini berarti sebagian besar cenderung tidak melakukan penghindaran pajak atau melakukan penghindaran pajak dalam skala yang kecil. Struktur komite audit berkisar 2-4 orang dalam sampel perusahaan dengan rata-rata ada 3 orang di setiap perusahaan. Terakhir,

valuasi nilai perusahaan yang cukup tinggi atas sampel perusahaan yaitu nilai mean (1.115) melebihi nilai standar deviasi (0.408). Hasil uji asumsi klasik menunjukkan tidak terjadinya normalitas yaitu nilai *p-value* sebesar 0,051 ($>0,05$), sehingga data terbukti terdistribusi normal dan model regresi ini dapat dilanjutkan. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan semua variabel penelitian memiliki nilai $VIF < 10$, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas diatas, dengan *scatter plot*, terlihat bahwa titik-titik yang ada tidak membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) dan titik – titik menyebar disekitar angka 0 pada sumbu y, maka mengindikasikan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Terakhir, hasil pengujian autokorelasi menggunakan Durbin-Watson menunjukkan tidak adanya autokorelasi karena nilai *Durbin Watson* sebesar 1.833 berada pada daerah $du \leq dw \leq 4-du$ (1.665 – 1.802).

Tabel 5
Hasil Pengujian Uji t (Parsial)

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|--------|-------|
| | B | Std.Error | | | |
| 1 (Constant) | | | | -3.070 | 0.003 |
| Penghindaran Pajak | 0.966 | 1.035 | 0.035 | 0.456 | 0.649 |
| Kepemilikan <i>Blockholder</i> | 0.988 | 1.012 | 0.011 | 0.150 | 0.881 |
| Komisaris Independen | 0.966 | 1.035 | 0.062 | 0.820 | 0.413 |
| Komite Audit | 0.901 | 1.110 | 0.188 | 2.383 | 0.019 |
| Ukuran Perusahaan | 0.907 | 1.103 | 0.378 | 4.819 | 0.000 |

Sumber : Pengolahan data BEI dengan SPSS 22

Dikarenakan pengukuran Penghindaran Pajak berbanding terbalik yang menyatakan bahwa semakin besar rasio koefisien, maka semakin rendah penghindaran pajak, sehingga koefisien (B) bersifat negatif. Berdasarkan pada tabel di atas dapat dikatakan bahwa variabel Penghindaran Pajak dengan tingkat signifikansi sebesar 0.649 yaitu nilai $0.649 > 0.05$, karena itu dapat disimpulkan bahwa H_0 gagal ditolak yang berartivariabel Penghindaran Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

Selain itu, kepemilikan *blockholder* (Sig. 0.881) dan komisaris

independen (Sig. 0.413) tidak terbukti signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan komite audit (Sig. 0.019) terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Terakhir, ukuran perusahaan (Sig. 0.000) terbukti signifikan sebagai variabel kontrol atas nilai perusahaan.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Hanlon and Slemrod (2009) dalam Wang (2010) ditemukan, bahwa reaksi pasar bersifat negatif terhadap kabar tentang adanya

keterlibatan *tax shelter* sebagai tindakan *tax aggressiveness*, sehingga menyebabkan harga saham perusahaan secara rata – rata menjadi negatif. Ini berarti penghindaran pajak dapat menurunkan nilai perusahaan yang tercermin dalam harga saham perusahaan tersebut. Ini sejalan dengan penelitian Chen *et al* (2013) yang menyatakan bahwa pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dan berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Namun dari hasil pengujian untuk t-test, variabel *Penghindaran Pajak* tidak secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan yaitu nilai $0.649 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak tidak dapat dilihat dalam pembayaran pajak dalam jangka pendek yaitu 2 tahun observasi.

Blockholder adalah *large owners* yang memiliki minimal 5 % dari saham perusahaan. Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Zeckhouser and Pound (1990) dalam Yuliani dan Muizuddin (2014) ditemukan bahwa pemilik saham yang

besar memiliki kekuatan dan insentif yang kuat untuk memaksimalkan nilai saham. Namun dari hasil pengujian untuk t-test, variabel Kepemilikan *Blockholder* tidak secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan yaitu nilai $0.881 > 0.05$. Hal ini menunjukkan, bahwa kepemilikan *Blockholder* tidak dapat memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan, artinya dengan adanya kepemilikan *blockholder* tidak mampu meningkatkan nilai perusahaan.

Secara teoritis, keberadaan Komisaris Independen berhubungan dengan ketentuan penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Selain itu, Komisaris Independen juga memantau efektivitas penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang dapat mengurangi *agency problems*. Dengan teratasinya *agency problems*, perusahaan dapat menggunakan sumber dayanya secara efisien sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun dari hasil pengujian untuk t-test, variabel

Komisaris Independen tidak secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan yaitu nilai $0.413 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata komposisi dewan komisaris independen saat ini kurang efisien dalam menjalankan fungsi pengawasan hal ini dikarenakan ketentuan minimum dewan komisaris independen sebesar 30% mungkin belum cukup tinggi untuk menyebabkan para komisaris independen tersebut dapat mendominasi kebijakan yang diambil oleh dewan komisaris. Jika komisaris independen merupakan pihak mayoritas ($>50\%$), maka mungkin dapat lebih efektif dalam menjalankan peran monitoring dalam perusahaan.

Secara teoritis, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Ini terbukti dengan penelitian yang dilakukan oleh Klien (2002) dalam Rupilu (2011) yang menyatakan bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan

discretionary accrual yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen. Hal ini sejalan dengan hasil pengujian untuk t-test, variabel *Komite Audit* secara signifikan mempengaruhi nilai perusahaan yaitu nilai $0.019 < 0.05$ dan karena itu dapat disimpulkan, bahwa penelitian ini berhasil menolak H_0 yang berarti variabel Komite Audit berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan dengan koefisien beta sebesar 0.188.

SIMPULAN

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa apakah Penghindaran Pajak, Kepemilikan *Blockholder*, Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Hasil empiris menunjukkan, bahwa hanya komite audit yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan secara signifikan. Hal ini dikarenakan terpenuhinya proporsi jumlah komite audit di dalam sampel perusahaan dengan rata-rata 3 orang. Sedangkan, kepemilikan *blockholder*,

komisaris independen dan penghindaran pajak tidak terbukti signifikan terhadap nilai perusahaan.

Implikasi penelitian adalah pentingnya komite audit. Diantara mekanisme – mekanisme *corporate governance*, ada faktor yang dominan dalam meningkatkan nilai perusahaan adalah komite audit. Berdasarkan hasil penelitian ini, komite audit terbukti telah berjalan secara efektif dan efisien sebagai pengawas dan pemantauan terhadap manajemen perusahaan. Untuk kedepannya, perusahaan perlu meningkatkan jumlah komite audit agar tata kelola perusahaan akan semakin baik.

Penelitian ini hanya terbatas pada salah satu proksi pengukuran variabel penghindaran pajak dan nilai perusahaan yaitu Cash ETR dan Tobin's Q sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan. Oleh karena itu, penelitian dapat melakukan pengujian sensitivitas dengan menggunakan pengukuran lain atas variabel Nilai Perusahaan (seperti *Price Book Value*) dan variabel Penghindaran

Pajak (seperti *Book Tax Difference*, *Effective Tax Rate*), sehingga hasil penelitian lebih *robust*. Selain itu, dapat menambahkan *Corporate Transparency* sebagai variabel moderasi karena dengan transparansi kinerja keuangan perusahaan dapat mengklarifikasi kualitas laba perusahaan dalam rangka memitigasi tindakan penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Animah & Ramadhani, R.S. (2008), Pengaruh Struktur Kepemilikan, Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. *Tesis yang dipublikasikan. Universitas Hasanudin, Makasar.*
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8, 95 - 189.
- Armstrong, C.S., Blouin, J.L., Jagolinzer, A.D. & Lacker, D.F. (2013). *Corporate Governance*,

- Incentives and Tax Avoidance. *Working Paper SSRN*, 2013.
- Beasley, M.S. (1996). An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. *The Accounting Review*, 71, 443-65.
- Black, B. S., Jang, H. & Kim, W. (2006). Does Corporate Governance Predict Firm's Market Value? Evidence from Korea. *Journal of Law, Economics, and Organization*, 22 (2), Fall.
- Brickley, J.A., Coles, J.L. and Jarrell, G. (1997). Leadership structure: separating the CEO and chairman of the board. *Journal of Corporate Finance*, 3, 189-220.
- Chen A. & Kao, L. (2005). The Conflict between Agency Theory and Corporate Control on Managerial Ownership: The Evidence from Taiwan IPO Performance. *International Journal of Business*, 10(1), 39 – 61, 2005.
- Chen, X., Hu, N., Wang, X. & Tang, X. (2013). Tax avoidance and firm value: evidence from China. *Nankai Business Review International*, 5 (1), 25-42.
- Choi, H.M., Sul, W. and Min, S.K. (2012). Foreign board membership and firm value in Korea. *Management Decision* 50 (2), 207-233.
- Debby, J.F., Mukhtaruddin, Yuniarti, E., Saputra, D. & Abukosim. 2013, The Effect of Good Corporate Governance and Company's Characteristics to Firm's Value of Listed Banking at Indonesian Stock Exchange. *3rd Annual International Conference on Accounting and Finance (AF 2013)*.
- Dyreng, S., Hanlon, M. & Maydew, E. 2008. Long-Run Corporate Tax Avoidance. *Accounting Review*, 83 (1), 61-82.
- Hanlon, M. & Slemrod, J. (2009). What tax aggressiveness signal?

- Evidence from stock Price reaction to news about tax selter involvement. *Journal of Public Economics*, 93, 126 – 141.
- Herawaty, V. (2008), Peran Praktek Corporate Governance sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10 (2), 97 – 108.
- Jensen, M. & Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial behavior, Agency Costs, and Capital Structure. *Journal of Financial Economics*, 2, 305-360.
- Klien, A. (2002). Audit Committee, Board of Director Characteristics and Earnings Management. *Journal Accounting and Economics* 33 , 375-400.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013). Pengaruh Profitabilitass, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18, 58 - 66.
- Nasution, M. &Setiawan, D. (2007), Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi X Makassar. AKPM-05*
- Pohan, H.T. (2009). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akruai Pilihan, Tarif Efektif Pajak, dan Biaya Pajak tertunda terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*, 4 (2), 113-135.
- Rosenstein, S. & Wyatt, J.G. (1990). Outside directors, board independence, and shareholder wealth. *Journal of Financial Economics*, 26 (2), 175-191.
- Rupilu, W. (2011). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan pada

- Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*, 8 (1), 101 – 127.
- Sari, D.K & Martani, D. (2010). Karakteristik Kepemilikan Perusahaan, Corporate Governance dan Tindakan Pajak Agresif. *Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010*.
- Sari, A.M.P & Ardiana, P.A. (2014). Pengaruh Board Size terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7 (1), 177-191.
- Siagian, F., Siregar, S.V. & Rahadian, Y. (2013). Corporate Governance, Reporting quality, and firm value: evidence from Indonesia. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 3 (1), 4-20.
- Siallagan, H. & Machfoedz, M. (2006). Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi XI Padang*.
- Sujono. (2010). Determinan Struktur Modal, Inovasi dan Nilai Perusahaan (Studi pada Industri Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Ringkasan Disertasi. Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya Malang*.